

MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SAMBAS

Urai Riza Fahmi

Program Magister Administrasi Pendidikan. FKIP Untan, Pontianak

Email: raysriza@yahoo.co.id

Abstract.

This study aims to describe: (a) planning funds; (b) the organization of funds; (c) implementation of the funds; (d) the supervision of the fund management of BOS funds committed in SMP Negeri 3 Sambas. This study uses qualitative techniques of interview, and documentary studies. The type of data using observation extension, increase endurance, triangulation, discussions with colleagues and check. The results of this study are: (1) Planning BOS funds realized in the form of Plan and Budget Activity School (RKAS) are arranged based on the needs of the school within one year. (2) The organization in the management and disbursement of BOS is also contrary to the guidelines number 161 in 2014. (3) The use of BOS funds are not all used to plan and budget activities such as school fees are planned for one year. (4) The function of supervision in the management of BOS funds have not been up done either by internal or external oversight institutions.

Keywords: School Operational Assistance Fund Management

Pendidikan adalah merupakan kunci dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Mengingat pentingnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal maka seluruh komponen pendidikan seperti kurikulum, guru, siswa, sarana sekolah dan fasilitas sekolah menjadi sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan meningkat, jika dalam proses pembelajaran disamping didukung dengan guru yang berkualitas, juga ditunjang berbagai sarana prasarana pendidikan. Oleh sebab itu terwujudnya kompetensi siswa tergantung tersedianya

guru yang berkualitas, sarana prasarana yang keberadaannya tidak lepas dari besarnya anggaran pendidikan yang tersedia.

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Kehadiran dana BOS diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua siswa, dan bahkan jika dimungkinkan agar siswa miskin dapat mendapatkan pendidikan secara gratis atau setidaknya dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasar. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah. Wukir (2013:47) menyatakan bahwa “Manajemen Berbasis Sekolah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keunggulan sekolah melalui

pengambilan keputusan bersama. Keputusan bersama khususnya dalam memperjelas tujuan, indikator dan kriteria mutu yang ditetapkan sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif karena keputusan akan sesuai dengan kebutuhan pengembangan siswa”. MBS berupaya memberikan pelayanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memenuhi kriteria yang sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Sejalan dengan hal diatas maka menurut Mulyasa (2012:11) “Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efesiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.”

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, pemerintah akan terbantu baik dalam kontrol maupun pembiayaan sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada masyarakat kurang mampu yang semakin bertambah jumlahnya. Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Pengelolaan dana BOS haruslah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepala sekolah selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOS di sekolah mempunyai peran yang besar untuk mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa (2013:24) menyatakan “kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan pengelolaan keuangan dengan sebaik-

baiknya di sekolah”. Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu. Apa yang diungkapkan diatas menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah yang menghendaki dukungan kerja yang semakin efektif dan efisien, akuntabel dan transparan.

Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya peningkatan manajemen kepala sekolah secara profesional untuk mensukseskan program pemerintah yang sedang digulirkan. Lahirnya kebijakan dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, namun memunculkan masalah baru terkait dengan penyelewengan, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Tujuan baik pemerintah, tidak diimbangi dengan sistem yang ada, sehingga menjadi bumerang dan menghasilkan masalah baru. Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di tingkat sekolah perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program. Mulyasa (2012:178) mengemukakan bahwa “Evaluasi atau evaluation involves auditing adalah pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Proses manajemen BOS di sekolah meliputi perencanaan dalam hal pembiayaan disebut rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), perencanaan yang telah disusun dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi. Penyusunan alokasi anggaran memang menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS diperlukan laporan administrasi keuangan. Perwujudan dari manajemen adalah pengelolaan dana BOS agar efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Pemilihan lokasi penelitian di SMP Negeri 3 Sambas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dilandasi karena sekolah tersebut merupakan penerima dana bantuan operasional sekolah, sebagian besar orang tua siswa berpenghasilan menengah kebawah yang kebanyakan berprofesi sebagai petani letaknya didalam kota Sambas. Banyak pemberitaan yang ada dimedia cetak menyatakan bahwa dana bantuan operasional sekolah masih banyak disalahgunakan dan tidak sesuai dengan juknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya hal tersebut peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Sambas sudah sesuai dengan juknis dan prosedur manajemen bantuan operasional sekolah atau belum.

METODE

Permasalahan manajemen dana BOS sangat kompleks, oleh karena itu metode penelitian kualitatif diharapkan mampu menggali lebih jauh tentang kekhasan dalam manajemen dana BOS di SMP. Disamping itu untuk mengetahui dan sekaligus menganalisis manajemen dana BOS dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Meleong (2010:9-10) menyatakan Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sugiyono (2014:1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpul data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”. Sanapiah Faisal (1990:31) mendefinisikan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang harus pula memenuhi persyaratan sebagai *disciplined inquiry*. Sebagaimana penelitian pada umumnya, setiap kegiatan penelitian kualitatif haruslah dilaksanakan untuk menjawab masalah-masalah yang berarti; nilai temuannya memang penting atau cukup berarti (*meaningful topics, not trivial*)”.

Penerapan penelitian kualitatif yang sesuai adalah untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, mengeksplorasi untuk identifikasi informasi yang baru, memahami hal yang terbatas jumlahnya dan fokus yang mendalam dan rinci, mendeskripsikan fenomena untuk melahirkan teori/hipotesis, dan melihat fenomena menurut pandangan dan definisi mereka yang diteliti. John W. Creswell (2016:167) “tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian”. Sugiyono (2014:181) mengemukakan “dengan digunakannya metode penelitian kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai”.

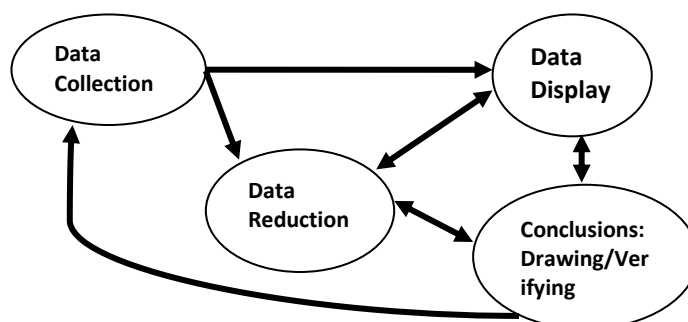
Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Sambas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan sumber data penelitian dengan memperhatikan bahwa informan yang dipilih sebagai sumber data dinilai mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun pertimbangan pemilihan informan adalah sebagai berikut : (1) informan banyak mengetahui tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, (2) informan berdomisili tidak jauh dari lokasi penelitian, (3) informan merupakan bagian dari tim manajemen bantuan operasional sekolah SMP Negeri 3 Sambas.

Berdasarkan kriteria yang telah diungkapkan diatas, subjek penelitian yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah (1) kepala SMP Negeri 3 Sambas, (2) wakil kepala sekolah, (3) pembina OSIS, (4) guru, (5) bendahara bantuan operasional sekolah, (6) operator sekolah, (7) ketua komite, (8) orang tua siswa non komite sekolah, (9) siswa, dan (10) tim manajemen BOS Kabupaten Sambas. Yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta – fakta yang diselidiki. Nasution dalam Sugiyono (2014:64) “menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Observasi ini merupakan karakteristik sosial antara peneliti dengan subjek penelitian. Dengan kata lain proses bagi

peneliti memasuki latar belakang dengan tujuan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana peristiwa dalam latar belakang saling berhubungan.

Sanafiah Faisal (1990:78) mengklasifikasikan obsevasi menjadi “observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang – terangan dan tersamar (*overt observation* dan *convert observasi*), dan observasi yang tak terstruktur (*unstructured observation*)”. Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari – hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan obsevasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah komunikasi langsung dengan alat berupa wawancara. Moleong (2010:186) menyatakan “ wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Studi dokumenter yang digunakan untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.” Langkah–langkah analisis ditujukan pada gambar berikut :



Bagan 1. Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)

Berdasarkan model analisis data dimulai sejak pengumpulan data. Analisis data terhadap data manajemen bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Sambas meliputi pencatatan data, pengorganisasian data, pemecahan data, mensintesis data, mengkaji pola-polanya, menentukan apakah suatu data dianggap penting dan memutuskan perlu tidaknya data yang diperoleh sebagai laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini dipaparkan tentang hasil wawancara dengan responden di SMP Negeri 3 Sambas yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, guru, operator, dan siswa. Selain di SMP Negeri 3 Sambas wawancara juga dilakukan di luar yaitu di rumah ketua komite dan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menemui tim manajemen BOS Kabupaten Sambas.

1. Perencanaan dana bantuan operasional sekolah

Dalam tahap perencanaan ini kepala SMP Negeri 3 Sambas tidak dapat bekerja sendiri, untuk itu dibentuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 3 Sambas dengan kepala sekolah sebagai penanggungjawab. Hal ini dapat dicermati melalui hasil wawancara dengan Fitriana,S.Pd selaku kepala sekolah yang menyatakan pelaksanaan evaluasi diri sekolah dilakukan oleh Tim Manajemen BOS dimana kepala sekolah sebagai Penanggung jawab. Penyusunan RKAS dilakukan melalui rapat kepala sekolah dan beberapa orang guru yang dihadiri juga oleh komite sekolah. Hasil observasi terhadap dokumen buku notulen rapat menunjukkan bahwa memang telah dilakukan rapat dengan seluruh komponen sekolah yang melibatkan unsur dewan guru, komite sekolah dan perwakilan orang tua siswa non komite untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal tahun anggaran seperti hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa perencanaan dibuat pada awal tahun yaitu bulan Januari.

Proses penyusunan RAPBS dan RKAS melibatkan unsur guru, karyawan, komite sekolah dan orang tua siswa seperti ungkapan Dedi Kusmayadi selaku bendahara BOS SMP Negeri 3 Sambas bahwa guru dan karyawan juga terlibat terutama dalam menentukan anggaran kebutuhan guru dan karyawan, misal untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, honor GTT dan PTT dimusyawarahkan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh sekolah. Peran komite berfungsi sesuai dengan fungsi, komite melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan berhubungan dengan penggunaan dana BOS, Komite juga menghadiri rapat pada saat penyusunan RKAS dan memberikan masukan-masukan tentang penggunaan dana BOS. Orang tua siswa juga dilibatkan dalam penyusunan RKAS dan dijadikan anggota dalam susunan manajemen BOS, tetapi beliau jarang datang untuk mengikuti rapat penyusunan RKAS dengan alasan kesibukan pekerjaan.

Menurut H.Helmi Markal selaku ketua komite SMP Negeri 3 Sambas bahwa dirinya sering diundang dan selalu menghadiri rapat pada saat penyusunan RAPBS dan RKAS, dan perannya sebagai wakil dari orang tua siswa harus memberi masukan dan memantau penggunaan dana BOS di sekolah. Hal senada juga diungkapkan oleh Suheri selaku orang siswa non komite yang menyatakan bahwa dirinya pernah diundang ke sekolah dalam rangka mengikuti sosialisasi dana BOS.

Dalam penyusunan RKAS tidak semua unsur yang mengikuti rapat penyusunan RKAS paham dan mengerti tentang apa yang terdapat didalam RKAS seperti yang diungkapkan oleh Neta,S.Pd selaku wakil kepala sekolah menyatakan tidak mengetahui tentang isi RKAS dibuat dengan alasan tidak berperan dalam penyusunannya karena yang berperan adalah tim yang dibentuk oleh kepala sekolah.

Demikian juga dengan pembina OSIS Kadrina,S.Pd juga mengatakan tidak memahami tentang RKAS karena terlalu rumit untuk dipahami. Beliau hanya paham tentang program OSIS yang dikelolanya untuk dimasukkan ke dalam RKAS dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya saja yaitu seputar kegiatan OSIS. Demikian juga dengan guru seperti Zainiah dan Hadida menyatakan proses penyusunan RKAS dilakukan tetapi tidak semua guru dilibatkan, dipilih guru yang mempunyai kemampuan, kalau beliau hanya diminta program untuk pengadaan obat-obatan UKS sesuai dengan tambahan tugas yang diberikan selaku pembina dan pengelola UKS. Demikian juga orang tua siswa non komite yaitu bapak Suheri menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui secara rinci tentang RKAS setahunya RKAS merupakan rencana kegiatan anggaran sekolah yang isinya merupakan rencana atau program sekolah selama satu tahun.

Proses penyusunan RKAS tidak mengalami perubahan sejak pergantian bendahara BOS dari Hermansyah,S.Pd yang dipromosikan menjadi kepala sekolah ditempat lain kepada Dedi Kusmayadi pada bulan Februari 2015. Dimulai dari identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan lewat evaluasi diri sekolah seperti yang dikemukakan oleh Fitriana,S.Pd selaku kepala sekolah bahwa RKAS dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu belanja gaji pegawai negeri dan tata usaha, honor terdiri dari honor GTT, PTT, pengelola BOS dan administrasinya, belanja barang dan jasa, dan program sekolah yang terdiri dari standar isi, standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan buku teks dan referensi, penerimaan siswa baru, bantuan siswa miskin dan perawatan sarana lingkungan sekolah.

Keterangan yang lebih lengkap diungkapkan oleh Dedi Kusmayadi

bendahara BOS mengenai pengelompokkan dana dalam RKAS adalah sebagai berikut RKAS dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu belanja gaji pegawai negeri dan tata usaha, honor terdiri dari honor GTT, PTT, pengelola BOS dan administrasinya, belanja barang dan jasa, dan program sekolah yang terdiri dari standar isi, standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan buku teks dan referensi, penerimaan siswa baru, bantuan siswa miskin dan perawatan sarana lingkungan sekolah yang diaplikasikan dalam 13 komponen yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan KKG/MGMP, membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan perangkat komputer, biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi.

Menurut H.Helmi Markal program yang paling diutamakan dalam penjabaran penggunaan dana BOS adalah menyangkut kelancaran proses belajar mengajar dan rutinitas sekolah jangan sampai terganggu. Mengingat terbatasnya jumlah dana yang diterima maka untuk program sekolah yang tidak dapat dibiayai dengan dana BOS, pihak sekolah melakukan pungutan kepada siswa baru pada awal tahun pelajaran seperti wawancara dengan Fitriana selaku kepala sekolah, Dedi Kusmayadi selaku bendahara, Zainiah dan Hadida selaku guru H.Helmi Markal selaku ketua komite sekolah serta Likardo dan Wiwit Ria selaku siswa SMP

Negeri 3 Sambas menyatakan hal yang sama yaitu sekolah melakukan pungutan untuk pembuatan pagar sekolah, besar pungutan tersebut Rp.150.000,- per orang tua yang dikenakan pada siswa baru setiap awal tahun pelajaran. Pungutan yang dilakukan untuk siswa baru sudah mengalami proses rapat komite dengan orang tua siswa, dimana komite sekolah menjelaskan kepada orang tua siswa tentang keperluan sekolah yang tidak dapat dibiayai oleh dana BOS di SMP Negeri 3 Sambas seperti apa yang dikatakan oleh H.Helmi Markal kepada orang tua siswa pada saat sosialisasi tentang dana BOS, beliau mengatakan bahwa sekolah melakukan pungutan terhadap siswa pada awal tahun pelajaran untuk pembangunan sarana prasarana yang tidak dapat dibiayai oleh dana BOS seperti pembangunan pagar sekolah dan WC siswa yang masih kurang. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Suheri selaku orang tua siswa kelas IX tetapi untuk anaknya tidak dipungut biaya karena sudah kelas IX.

Kegiatan penerimaan siswa baru (PSB) dengan kegiatan administrasi pendaftaran, pengadaan formulir dapodik, Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, konsumsi panitia, honor panitia, biaya pemasukan validasi, pemutahiran dan pengiriman dapodik, dan penyusunan RKS/RKAS. Bantuan siswa miskin yaitu membantu peserta didik miskin. Perawatan sarana prasarana dan lingkungan sekolah dengan kegiatan perbaikan meubeler, perbaikan komputer, pemeliharaan lingkungan sekolah, perbaikan sanitasi sekolah, pengecatan, perbaikan bangunan yang rusak.

Hasil wawancara dengan bapak Dedi Kusmayadi selaku bendahara BOS SMP Negeri 3 Sambas menyatakan penggunaan dana BOS disesuaikan dengan juknis yang ada dan paling diutamakan adalah kelompok program sekolah, belanja barang dan jasa, baru kemudian honor.

2. Pengorganisasian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa pengajuan dana BOS tahun anggaran 2015 dilakukan

pada bulan Januari 2015. Hal ini dikarenakan manajemen BOS tahun 2015 untuk mekanisme transfer rekening sekolah menjadi tranfer daerah sehingga menyesuaikan tahun anggaran bukan tahun pelajaran, oleh karena itu untuk SMP Negeri 3 Sambas sebagaimana disampaikan oleh Dedi Kusmayadi bendahara BOS dan Fitriana,S.Pd kepala SMP Negeri 3 Sambas adalah bahwa perencanaan penggunaan dana BOS SMP Negeri 3 menggunakan tahun anggaran yaitu di susun bulan Desember tahun 2014 dan diajukan pada awal tahun anggaran 2015 yaitu bulan Januari 2015”.

Adapun syarat pengajuan dana BOS adalah lewat dapodik dengan mengisi jumlah siswa bulan Desember. Berdasarkan data siswa bulan Desember 2014 merupakan acuan dari pemerintah untuk mengeluarkan dana BOS yang akan diterima selama tahun anggaran 2015 yang terdiri dari tahun pelajaran 2014/2015 dan tahun pelajaran 2015/2016. Tahun pelajaran 2015/2016 dimulai dari bulan Juli 2015 jumlah dana yang akan diterima berdasarkan usulan jumlah siswa bulan Januari tahun 2015. Jadi kalau dilihat dari tahun pelajaran 2015/2016 maka dana yang akan keluar berdasarkan dua tahun anggaran yaitu triwulan pertama tahun pelajaran 2015/2016 sama dengan triwulan ketiga pada tahun anggaran 2015 yaitu bulan Juli 2015 dan triwulan ketiga tahun pelajaran 2015/2016 sama dengan triwulan pertama tahun anggaran 2016 yaitu bulan Januari 2016.

Alokasi dana bantuan operasional sekolah yang diterima pada tahun anggaran 2015 dari triwulan I pencairannya terlambat yaitu cair pada tanggal 10 Februari 2015, triwulan II tepat waktu yaitu tanggal 16 April 2015, triwulan III juga tepat waktu yaitu tanggal 14 April 2015, triwulan IV sedikit terlambat yaitu tanggal 19 Oktober 2015. Hal yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2016 pencairan dana bantuan operasional sekolah pada triwulan I pencairannya juga mengalami keterlambatan yaitu pada tanggal 24 Februari 2016, triwulan II ada masalah

hukum dengan dana bantuan operasional sekolah di daerah sehingga pencairan dana untuk triwulan II di tahan sementara oleh Gubernur Kalimantan Barat sampai masalahnya selesai. Pencairan dana triwulan II barua dapat dicairkan pada 26

Juli 2016, triwulan III pencairan dana juga mengalami keterlambatan yaitu tanggal 4 Agustus 2016 dan triwulan IV juga mengalami keterlambatan yaitu 26 Oktober 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 1
Besar Dana BOS Tahun Anggaran 2015

No	Triwulan	Jumlah Dana	Tahun Anggaran	Tanggal Dana Masuk
1	I	Rp 80,250,000.00	2015	10 Februari 2015
2	II	Rp 80,250,000.00	2015	16-Apr-15
3	III	Rp 80,250,000.00	2015	14 Juli 2015
4	IV	Rp 80,250,000.00	2015	19 Oktober 2015

Tabel 2
Besar Dana BOS Tahun Anggaran 2016

No	Triwulan	Jumlah Dana	Tahun Anggaran	Tanggal Dana Masuk
1	I	Rp 78,500,000.00	2016	24 Oktober 2016
2	II	Rp 78,500,000.00	2016	26-Jul-16
3	III	Rp 78,500,000.00	2016	04 Agustus 2016
4	IV	Rp 78,500,000.00	2016	26 Oktober 2016

Sumber : Dokumen Sekolah

Pencairan dana bantuan operasional sekolah dilakukan apabila sekolah tersebut sudah membuat laporan pertanggungjawaban, misalnya untuk pencairan dana bantuan operasional sekolah triwulan I tahun pelajaran 2015/2016 terlebih dahulu kita harus membuat laporan triwulan IV tahun pelajaran 2014/2015 secara lengkap dengan mengisi formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6 kemudian dilengkapi dengan kuitansi pembelian dan daftar penerimaan setelah itu dilengkapi dengan formulir BOS-K7 dan BOS-K7a. Kalau formulir BOS-K7 dan BOS-K7a sudah ditandatangani oleh dinas pendidikan kabupaten barulah dana bantuan operasional sekolah dapat dicairkan. Untuk pencairan dana penandatanganan kuitansi

cukup dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS.

Pencairan dana bantuan operasional sekolah tahun pelajaran 2015/2016 untuk triwulan pertama dilakukan pada bulan Juli, triwulan kedua bulan Oktober 2015 berjalan dengan lancar. Pada tahun anggaran 2016 yaitu pada saat pencairan dana untuk triwulan ketiga yang merupakan triwulan pertama tahun anggaran 2016 mengalami keterlambatan seperti yang dikemukakan oleh Dedi Kusmayadi bendahara SMP Negeri 3 Sambas bahwa dana masuk direkening sekolah untuk tahun anggaran 2016 mengalami keterlambat yaitu Triwulan pertama 24 Februari 2016 sebesar Rp.78.500.000,-, triwulan kedua 26 Juli 2016 sebesar Rp.78.500.000,-

triwulan ketiga 4 Agustus 2016 sebesar Rp.78.500.000. (Hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2016). Menurut Dedi Kusmayadi keterlambatan yang terjadi pada triwulan kedua sampai satu triwulan yaitu 26 Juli 2016 yang seharusnya dana itu harus cair bulan April 2016, ini disebabkan karena adanya pemblokiran dana BOS oleh Gubernur Kalimantan Barat karena ada permasalahan di daerah yang tersangkut masalah hukum dengan pengelolaan dana BOS.

Model pengelolaan dana BOS yang dilakukan tidak terpaku pada petunjuk teknis BOS yang hanya tiga orang, terdiri atas kepala sekolah, bendahara BOS dan wakil orang tua non komite, melainkan mengikut sertakan guru dan karyawan sebagai panitia kegiatan atau penanggungjawab kegiatan. Pada penyusunan anggaran sudah dibentuk panitia anggaran, dalam setiap kegiatan juga telah dibentuk panitia kegiatan yang bertugas membuat rencana kegiatan dan anggaran, menggunakan dana BOS sesuai rencana dan menyusun laporan penggunaan yang diserahkan kepada bendahara setelah disetujui oleh kepala sekolah.

Pihak yang terkait dalam penyusunan RKAS adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, dan wali kelas serta beberapa orang guru yang

mendapat tugas tambahan sebagai urusan kurikulum, kesiswaan, hubungan kemasyarakatan dan sarana prasarana. Hal ini dilakukan mengingat jumlah guru dan karyawan berjumlah 26 orang sehingga kurang efektif dan efisien jika dilibatkan semuanya. Mengingat penyusunan RKAS dibatasi oleh waktu maka hanya beberapa guru dan karyawan yang terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran yang bersumber dari dana BOS. Untuk itu dibentuklah tim pengembang sekolah seperti yang dikemukakan oleh Fitriana,S.Pd selaku kepala sekolah menyatakan bahwa dalam penyusunan RKAS ada tim pengembang sekolah secara struktural pengarah Drs.Kustaq,M.Djamil,M.Pd pengawas yang membina SMP Negeri 3 Sambas, Fitriana,S.Pd sebagai Ketua 1, Satriana,S.Pd.Fis sebagai ketua 2, Neta,S.Pd sebagai Sekretaris 1, Dedi Kusmayadi sebagai sekretaris 2, sebagai anggota semua guru dan karyawan SMP Negeri 3 Sambas.

Adapun tim manajemen BOS tingkat SMP Negeri 3 Sambas berdasarkan surat keputusan kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sambas Nomor : 800/036/Peg tanggal 2 Februari 2015 adalah sebagai berikut

Tabel 3
Susunan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 3 Sambas

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Fitriana,S.Pd	Penanggungjawab	
2	Dedi Kusmayadi	Anggota	
3	Suwito	Anggota	

Sumber : Dokumen Sekolah

3. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Penggunaan dana BOS, semuanya atas persetujuan kepala sekolah, koordinator kegiatan dalam pencairan dana

sebelum dana dikeluarkan oleh bendahara BOS terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kepala sekolah kemudian baru diserahkan kepada bendahara BOS untuk

dicairkan dananya. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan rencana dan kegiatan anggaran sekolah. Pada penjabaran penggunaan dana program yang paling besar anggarannya seperti yang dikemukakan oleh kepala sekolah Fitriana, S.Pd adalah program sekolah, belanja barang dan jasa, serta honor”.

Menurut kepala sekolah bahwa semua kegiatan yang tertuang dalam rencana RKAS tidak semuanya dapat dilaksanakan hal yang sama juga diungkapkan oleh bendahara BOS bahwa tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang ada seperti rencana pembelian AC untuk perpustakaan diganti dengan pembelian kipas angin.

Menurut Dedi Kusmayadi selaku bendahara dalam pengelolaan dana yang menjadi kendala adalah keterlambatan dalam pencairan dana dan pembuatan laporan kegiatan dalam bentuk format BOS-K7a. Untuk mengatasi hal tersebut supaya kegiatan proses belajar mengajar dan rutinitas di sekolah tidak terganggu maka kepala sekolah menggunakan berbagai macam cara seperti dalam memenuhi kebutuhan administrasi sekolah misalnya pembelian ATK dilakukan dengan cara mengutang di toko yang menjadi langganan sekolah, untuk menanggulangi honor tenaga GTT dan PTT dengan cara meminjam dulu dengan koperasi sekolah.

Mengenai keterlambatan pencairan dana diungkapkan oleh Suherlan selaku tim manajemen BOS Kabupaten adalah keterlambatan cairnya dana BOS setiap tahun ajaran sebenarnya berasal dari pusat, biasanya begitu dana BOS ditransfer dari pusat ke provinsi paling lambat 14 hari setelah dana ditransfer ke provinsi dana tersebut harus sudah sampai ke kas kabupaten dan dilanjutkan ke rekening sekolah masing-masing. Untuk sekarang ini yang menjadi permasalahan dan kendala bagi tim manajemen BOS kabupaten adalah sulitnya masuk dalam login dapodik BOS secara online, banyak sekolah yang belum dapat memahami juknis yang ada sehingga laporan BOS dari sekolah ke Tim BOS Kabupaten selalu terlambat dan akibatnya

akan berpengaruh terhadap pencairan dana BOS.

Laporan penggunaan dana BOS dilakukan pada bulan terakhir masing-masing triwulan. Triwulan pertama untuk tahun anggaran 2015 dilakukan pada akhir bulan Maret 2015 dan triwulan kedua dilakukan pada akhir Juli 2015, triwulan 3 dibuat akhir September dan triwulan 4 dibuat akhir Desember 2015 sebagaimana yang diutarakan oleh Dedi Kusmayadi bendahara BOS SMP Negeri 3 Sambas yaitu untuk tahun anggaran 2015 laporan triwulan 1 dibuat akhir Maret dan dilaporkan paling lambat 10 April 2015, triwulan II dibuat akhir Juni dan dilaporkan paling lambat 10 Juli 2015, triwulan 3 dibuat pada akhir September 2015 dan dilaporkan selambat-lambatnya 10 Oktober 2015, triwulan 4 laporan dibuat pada akhir bulan Desember 2015 dan dilaporkan selambat-lambatnya 10 Januari 2016, untuk tahun anggaran 2016 laporan triwulan 1 dibuat pada akhir bulan Maret 2016 dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 April 2016, triwulan 2 laporan dibuat pada akhir bulan Juni 2016 dan dilaporkan selambat-lambatnya pada 10 Juli 2016 dan seterusnya.

Guru sebagai pelaksana kegiatan harus melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada kepala sekolah melalui serah terima barang. Laporan pertanggungjawaban BOS harus sesuai dengan rencana dan kegiatan anggaran sekolah yang telah dibuat. Jadi tidak boleh untuk kepentingan diluar rencana kerja yang sudah diprogramkan. Kebijakan ini dimaksud oleh Dinas Pendidikan Kabupaten agar dalam penyusunan rekapitulasi penggunaan dana se-Kabupaten Sambas tidak mengalami masalah. Mengingat dalam pencairan dana berikutnya laporan rekapitulasi penggunaan dana yang dijabarkan dalam format BOS-K7a sebagai syarat untuk pencairan dana selanjutnya. Kalau pihak sekolah terlambat membuat laporan dalam bentuk format BOS-K7a akan berakibat pencairan dana triwulan berikutnya akan menjadi terlambat.

Menurut Dedi Kusmayadi bahwa laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah terdiri atas “Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu kas, buku Bank, buku pajak, kuitansi pembelian, daftar penerimaan honor atau insentif dan tranfort dan format BOS-K7a”. Model penyusunan laporan pertanggungjawaban agak sedikit rumit dan membingungkan, sehingga pada triwulan pertama mengalami kesalahan terutama dalam pembuatan laporan BOS-K7a. Menurut tim manajemen BOS Kabupaten, untuk menertibkan administrasi pelaksanaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah diharuskan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana setiap triwulan seperti yang dikatakan oleh Suherlan yang merupakan tim manajemen BOS kabupaten Sambas berikut ini Untuk tertib administrasi maka dalam mekanisme pengajuan dana BOS sekolah diharuskan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana setiap triwulan. Komponen yang diajukan untuk memperoleh dana BOS adalah membuat laporan realisasi kegiatan dalam bentuk format K-7a selain ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara BOS laporan tersebut harus juga ditandatangani oleh Manajer BOS Kabupaten dan Kepala UPT Kecamatan masing-masing. Lebih lanjut Dedi Kusmayani menyatakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dikoreksi dan diteliti jika ternyata masih ada kesalahan dalam penyusunan laporan, sekolah disuruh memperbaikinya.

4. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana bantuan operasional sekolah yang telah diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang telah dikirimkan lewat dapodik selanjutnya digunakan sesuai dengan rencana dan kegiatan anggaran sekolah (RKAS) kemudian disusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Laporan dana tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan ditempel pada papan informasi BOS di sekolah. Terhadap kegiatan penyusunan laporan

pertanggungjawaban dana BOS tersebut harus dilakukan pengawasan dan monitoring atau pemeriksaan. Kegiatan pengawasan tersebut untuk mengetahui dan membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan apakah sudah sesuai atau terjadi penyimpangan. Dari data yang diperoleh bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim manajemen kabupaten ternyata belum efektif.

Pelaksanaan pengawasan penggunaan dana BOS dilakukan setahun sekali seperti yang dikatakan oleh Fitriana, S.Pd kepala SMP Negeri 3 Sambas pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS dilakukan satu tahun sekali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Pengawasan dalam bentuk monitoring atau evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang dikirim oleh sekolah. Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana BOS seperti yang diungkapkan oleh Suherlan selaku tim manajemen BOS Kabupaten berikut pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan BOS di Kabupaten Sambas baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Monitoring dilakukan setiap triwulan, tetapi dari 19 Kecamatan yang ada di kabupaten Sambas tidak semua dilakukan monitoring. Tidak semua sekolah dapat dilakukan monitoring, mengingat jumlah SMP Negeri saja 113 sekolah ditambah lagi SD sebanyak 405 sekolah tidak memungkinkan kami dapat mengunjungi semua sekolah tersebut. Monitoring hanya diambil sampelnya saja yaitu untuk SMP dan SD masing-masing diambil 4 sekolah untuk satu kecamatan.

Selain Tim manajemen BOS pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BOS juga dilakukan oleh Inspektorat wilayah Kabupaten Sambas. Untuk audit dana BOS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten juga dilakukan secara acak dan SMP Negeri 3 Sambas belum pernah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari Dari seluruh uraian hasil pembahasan penelitian, pembahasan dan analisis yang telah disajikan pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. RKAS dibuat berdasarkan tahun anggaran, dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu belanja gaji pegawai negeri dan tata usaha, honor, belanja barang dan jasa, dan program sekolah, ini tidak sesuai dengan Juknis permendikbud nomor 161 tahun 2014; 2. Pengorganisasiandalam pengelolaan sesuai dengan SK nomor: 800/036/Peg tanggal 2 Februari 2015 terdiri dari Fitriana,S.Pd selaku kepala sekolah sebagai penanggung jawab, Dedi Kusmayadi selaku bendahara sebagai anggota dan Suwito selaku orang tua siswa non komite sebagai anggota telah sesuai dengan juknis yang berlaku; 3. Penggunaan dana BOS tidak semuanya digunakan sesuai rencana dan kegiatan anggaran sekolah seperti honor yang direncanakan untuk satu tahun Rp.50.000.000, atau (15,58%) dari anggaran ternyata realisasinya sampai Rp.71.304.500,- terjadi kesenjangan sebanyak Rp.21.304.500, (5,38%) melebihi dari persentase yang telah ditetapkan dalam juknis. Program yang paling besar anggarannya secara berurutan adalah program sekolah, belanja barang dan jasa, 2. Dengan kebijakan transfer daerah, pencairan dana sering mengalami keterlambatan, oleh karena itu pemerintah sebaiknya mengubah mekanisme dengan transfer langsung dari pemerintah pusat langsung kerekening sekolah. Kepada pemangku kebijakan untuk tetap mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan, sehingga keterlambatan pencairan dana tidak lagi terjadi. 3. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen oleh karena itu

serta honor. Mekanisme penggunaan dana BOS, semuanya atas persetujuan kepala sekolah, koordinator kegiatan dalam pencairan dana sebelum dikeluarkan oleh bendahara BOS terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kepala sekolah kemudian baru diserahkan kepada bendahara untuk dicairkan dananya. Sekolah melakukan pungutan kepada siswa baru setiap awal tahun pelajaran untuk keperluan pembangunan pagar sekolah. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS adalah banyak sekolah yang belum dapat memahami juknis, keterlambatan dalam pencairan dana, dan sulitnya masuk dalam login dapodikdasmen BOS secara on line; 4. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana BOS belum maksimal dilakukan baik oleh lembaga pengawasan internal maupun eksternal. Dinas pendidikan kabupaten mengadakan pengawasan hanya bersifat administratif saja dan belum menyentuh sampai pelaksanaan dilapangan.

Saran

1. Sebaiknya pengalokasian dana didasarkan pada kebutuhan sekolah dan bukan atas ketersediaan dana. Anggaran untuk honor pegawai maksimal 15% dari jumlah dana yang diterima ternyata tidak mencukupi, untuk itu supaya disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. 2. Pengawasan melekat dan tenaga kepengawasan sebaiknya lebih diefektifkan lagi. 3. Para stakeholder pendidikan (kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua siswa dan masyarakat) sebaiknya ikut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan dana BOS. 4. Tim manajemen BOS kabupaten sebaiknya menambah personal dengan melibatkan pengawas sekolah untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap sekolah yang menjadi binaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah Anton, (2010), **Dasar-Dasar Manajemen**, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Creswell, W John, Research Design. Alih bahasa Ahmad Fawaid. (2016) **Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Daft, L. Richard, **New Era Of Management**. Alih bahasa Tita Maria Kanita. (2010). **Era Baru Manajemen**, Jakarta, Salemba Empat.
- Faisal, Sanapiah, (1990), **Penelitian Kualitatif dasar-dasar aplikasi**, Malang YA3.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles Of Management*. Alih bahasa G.A. Ticoalu (2014), **Dasar-Dasar Manajemen**, Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Hersey, Paul & Kenneth Blanchard, (1982), *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Englewood Cliffs, New Jersey 07632: Prentice-Hall, Inc.*
- Heryati Yeti dan Mumuh Muhsin, (2014) , **Manajemen Sumber Daya Pendidikan**. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Hikmat, (2014), **Manajemen Pendidikan**, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Kusno, (2013), **Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang**. Tesis. Pontianak Universitas Tanjungpura
- Tatang, (2015) , **Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah**, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Tim Dosen AP UPI, (2011), **Majemen Pendidikan**, Bandung, Alfabet.
- Usman, Husaini (2011), **Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan**, Jakarta Timur, PT. Bumi Aksara.
- Permendikbud RI Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
- Moleong, J Lexy (2010), **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Amin, Maswardi (2016), **Manajemen Mutu**, Yogyakarta, Media Akademi.
- Mulyana, Deddy, (2013), **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, (2012), **Manajemen Berbasis Sekolah**, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
- , (2013), **Menjadi Kepala Sekolah Profesional**, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Muhamad (2014), **Manajemen Pendidikan**, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada,
- Muzamil, (2011), **Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Sulang Kabupaten Rembang**. Tesis Semarang Universitas Negeri Semarang.
- Saud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsudin Makmun, (2011) **Perencanaan Pendidikan**, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti, (2003), **Good Governance, Kepemimpinan Yang Baik dalam rangka otonomi daerah**, Bandung, Mandar Maju.
- Sugiyono, (2013), **Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. (di SDN Tanjung 01, SDN Tanjung 02, SDN Sengon 02)**. Tesis Semarang Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono, (2014), **Memahami Penelitian Kualitatif**, Bandung, Alfabeta.
- Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015
- Pidarta, Made (2011), **Manajemen Pendidikan Indonesia**, Jakarta, PT. Rineka Cipta,
- W.Mantja, (2010), **Propesionalisasi Tenaga Kependidikan, Manajemen pendidikan dan Supervisi Pengajaran**, Malang, Elang Mas.
- Wukir, (2013), **Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah**, Yogyakarta, Multi Presindo.

